

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

------. *Hukum Pengangkutan Darat dan Udara*. Jakarta: Aditya Bakti, 2005.

Alrasid, Harun. *Masalah "Judicial review"*. (Makalah ini disampaikan Dalam Rapat Dengar Pendapat Tentang "Judicial review" di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta: 2003.

Asshidqie Jimliy. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

------. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.

------. *Konstitusi dan Konstitualisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.

------. *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

------. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2010.

Basrowi. *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

C. Jotin Khisty. B. Kent Lall, *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi*.

Padang: Universitas Bung Hatta 2003.

C.S.T. Kansil, S.H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradya Paramita, 2001.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Febra, Robiyanto. *Akuntansi Praktis Usaha Kecil dan Menengah*. Semarang: Studi Nusa, 2004.

H.A.S, Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Hadisoeparto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Hans, Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Kagramanto, Budi. *Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: Laras, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Mamudji, Sri. *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Depok : Badan Penerbit Alumni, 2005.
- Ma'sum, Ahmad. *Politik Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Mukti, Fajar dan Yuliano, Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mulyadi, Nitisusastro. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Nur, Syam Aksa. *Pengantar Transportasi Wilayah dan Kota*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin, 2014.
- Padmo, Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum Cet 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rahardjo, Adisasmita. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rianto, Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Soedikno, Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2001.
- Soegiana, Tjakranegara. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset,1990.
- Syarif, Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana,2015.
- Y. Maryono, B. Patemi Istiana. *Teknologi Informasi dan Komunikasi 1*. Yogyakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008.
- Zainal Arifin, Hoesein. *judicial review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian perundang-undangan*. Jakarta, MA Press, 2010.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/hum/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.78/PUU-XIV/2016

III. WEBSITE

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50924dbf2adlf/status->

[hubungan-pengojek-dan-perusahaan-aplikasi-layanan-ojek](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50924dbf2adlf/status-hubungan-pengojek-dan-perusahaan-aplikasi-layanan-ojek)

<http://www.go-jek.com/term>

<http://www.kompas.com>